

KEMBALI PADA SISTEM EKONOMI ISLAM, PENYADARAN SECARA KOMPREHENSIF

Sugeng Pamudji

Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang

Abstraksi

Krisis ekonomi berkepanjangan belum ada harapan untuk segera usai. Perdebatan para ahli ekonomi dengan berbagai asumsi dan sudut pandang terasa benar, tetapi solusi yang ditawarkan tidak pernah *mujarab*. Meskipun sering kita dengar dari para konseptor ekonomi dengan berbagai instrumen yang dimilikinya mengatakan “ini adalah satu-satunya cara”. Semua sekedar wacana, antar ekonom, pemegang legalitas, eksekutif dan pelaku bisnis dengan jalan masing-masing, sehingga tidak *nyambung*, bahkan saling bertentangan. Paradoks-paradoks kebijakan berhamburan diterapkannya tidak menyentuh sasaran. Kebijakan fiskal, moneter, JPS, penentuan harga, dan lain-lainnya selalu dimanfaatkan oleh yang kaya, kuasa dan menang. Hanya untuk memutuskan hubungan dengan IMF saja banyak ditumpangi dengan kepentingan-kepentingan sehingga lolos dari kepentingan rakyat walau atas nama rakyat. Dari sini dibutuhkannya *kesalehan ekonomi*.

Kata Kunci : Sistem Ekonomi Islam, Moral Ekonomi Islam, Gambling Economic System, Sistem Moneter Islam, Zakat, Infak, Sodaqoh

Pendahuluan

Moral Ekonomi Islam

Sebelum pembahasan, saya ketengahkan ilustrasi bagaimana setting ekonomi para sahabat Rosulullah yaitu *Abudzar Al Ghifari* dan *Umar Bin Abdul Azis* sebagai teladan dimasa krisis ekonomi yang berkepanjangan ini. Mari kita menelusuri kemakmuran ekonomi pada masa sahabat Rosulullah atau kejayaan masa *Khulafaurrasyidin*. Salah satu Sahabat Rosulullah yang memiliki doktrin ekonomi **Abudzar Al Ghifari**.

Ada apa gerangan dengan doktrinnya?. Abudzar sangat menentang kapitalisme jauh sebelum Karl Marx lahir dengan marxisme dan komunismenya. Dan dia menganjurkan konsep *Full Employment* jauh sebelum Keynes merumuskan *The General Theory*. Oleh karena itu perlu dipahami beberapa konsepsi dasar yang digunakannya dalam memimpin rakyatnya dengan keimanan pribadinya, rumusan teorinya maupun bagaimana mengalokasikan kekayaan negara.

Keyakinan pribadi Abudzar sangat dipengaruhi oleh ayat-ayat Alqur'an terutama surat Alma'un, Yunus, Attakasur dan Taubah yang menerangkan bahwa kekayaan disamping kenikmatan, juga sebagai fitnah atau ujian. Bagaimana dapat menjadi orang beragama jika masih dikatakan sebagai pendusta agama, yaitu ketika masih menghardik anak yatim, tidak mau memberi makan orang-orang miskin, dan enggan menolong dengan barang yang berguna (Surat Al Maa'un). Ayat inilah yang mengguncangkan hati Abudzar, sehingga dia sendiri mengharamkan untuk dirinya sendiri memiliki sisa penghasilan untuk ditabung/disimpan. Artinya dia tidak mau bermegah-megahan dan mengumpulkan harta, sehingga melupakan dari ketaatan beragama (Surat Attakaasur). Dan ini disadur oleh **Ahmad Dahlan** pendiri Muhammadiyah dalam menhgamakan agama Islam. Oleh karena itu, saat ini pantas jika dipertanyakan bagaimana keberagaman bangsa Indonesia, terutama para pemimpinnya sehingga terjadi krisis ekonomi sampai sudah berjalan 4 tahun belum ada tanda tanda usai.

Harta adalah perumpamaan seorang yang memiliki kebun luas yang subur dengan kecukupan curah hujan lalu berbuah yang indah lagi banyak, dan pemiliknya merasa dapat menguasainya, tetapi keesokan harinya tanaman-tanaman tersebut laksana sudah disabit disabit seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin (Surat Yunus, 24). Inilah yang menjadi keyakinan Abudzar bahwa kekayaan adalah pemilikan yang sangat sementara seperti fatamorgana. Ditambah lagi keyakinannya bahwa siapa saja yang suka sekali menumpuk emas dan perak (kekayaan) dan tidak memanfaatkannya di jalan Allah, beritahu kepada mereka bahwa hukuman yang sangat pedih akan mereka terima (Surat Taubah, 34).

Dengan keyakinannya yang mendalam tentang ayat-ayat diatas maka Abudzar tidak mau memiliki sisa kekayaan sedikitpun. Semua penghasilan dibelanjakan atau dibagikan kepada fakir miskin untuk dibelanjakan. Secara Teori Ekonomi Makro Modern bahwa semakin MPC (*Marginal Propensity To Consume*) masyarakat yaitu sebagian dari pendapatan digunakan untuk konsumsi maka akan menghasilkan pendapatan agregat masyarakat yang semakin besar. Dan semakin besar MPS (*Marginal Propensity To Saving*) masyarakat yaitu sebagian dari pendapatan agregat masyarakat semakin kecil.

Karena MPS adalah menjadi sumber *idle of resources* (pengangguran sumber daya). Dimana secara *multiflier effect* (efek yang berlipat ganda) secara simultan

berpengaruh pada lingkaran kegiatan ekonomi. Kalau toh MPS yang menjadi tabungan itu menganggur maka harus dikeluarkan dalam bentuk investasi. Abudzar belum atau tidak mengatakan sebagai investasi tetapi harus seluruhnya dikeluarkan yaitu dibagikan kepada fakir miskin. Dengan dikeluarkannya untuk fakir miskin secara otomatis menjadi konsumsi yang akan meningkatkan daya beli masyarakat. Hal demikian akan bermuara kepada investasi, karena dimungkinkan harta yang disimpan / ditabungan kemudian dibagikan menjadi daya beli masyarakat / mendorong investasi sehingga yang semestinya tersimpan menjadi sama dengan investasi.

Saat ini lewat lembaga keuangan (perbankan) tidak menjamin menjadi investasi. Kita lihat awal krisis ekonomi sejak awal tahun 1998 adalah rusaknya lembaga keuangan dengan adanya kredit macet dan perbankan yang tidak cukup. Dari sanalah awal mula terjadinya idle capital. Padahal uang rakyat banyak terkumpul dilembaga keuangan perbankan.

Dari analisis diatas Abudzar jauh lebih awal mengamalkan konsepsi Keynes yang dianggap peletak dasar ekonomi modern yang memberikan kaidah tabungan harus menjadi investasi sehingga dapat mencapai kondisi *full employment* (penggunaan semua sumber daya secara penuh). Jika demikian maka *multiplier effect* mencapai tak terhingga. Sekaligus mendahului Karl Marx karena konsep pemerataan yang dianjurkannya. Artinya tidak akan mungkin terjadi krisis karena lingkaran ekonomi tak terganggu.

Kemudian dampak selanjutnya, dengan tidak terjadinya pengumpulan harta pada diri seseorang akan melimpahkan sisi penawaran yang sekaligus memperkuat sisi permintaan. Sehingga dimungkinkan harga produk menjadi murah kemudian diikuti permintaan sehingga tidak dimungkinkan terjadi over supply karena daya beli kuat yang disebabkan ada tambahan pendapatan dari zakat, infak dan atau sodaqoh sisa penghasilan yang langsung dikeluarkan. Setelah itu diikuti permintaan lagi, kemudian diikuti penawaran lagi, lalu permintaan meningkat lagi. Oleh karena itu tidak mungkin terjadi krisis yang berkepanjangan dikarenakan terjadi over supply karena tidak ada daya beli dan terjadi over demand karena terhambatnya supply.

Konsepsi Tentang Keuangan Negara

Untuk mempersepsikan bagaimana Abudzar menilai kekayaan negara ada baiknya kita sitir dialog Abudzar dengan gubernur Bahrain **Abu Hurairah**.

“Anda telah diangkat sebagai gubernur Bahrain?” tanya Abudzar.

“Benar” jawab Abu Hurairah.

“Di sana Anda tentunya telah membangun rumah seperti istana dan membeli sebidang tanah yang luas” tambah Abudzar.

“Tidak benar itu” jawab Abu Hurairah lagi.

“Kalau begitu Anda adalah saudaraku” kata Abudzar kemudian langsung memeluknya.

Disamping itu ada pelajaran dari teguran Abudzar kepada Gubernur Syiria **Muawiya** yang senang hidup mewah dan suka menumpuk harta. Ketika Muawiya membangun istana hijau yang bernama Al Khisra, Abudzar berkata:

“Kalau Anda membangun istana ini dari uang negara, berarti Anda telah menyalah gunakan uang negara. Kalau Anda membangunnya dengan uang anda sendiri, berarti Anda telah menyalah gunakan uang negara. Kalau Anda membangunnya dengan uang Anda sendiri, berarti Anda melakukan *‘israf* (pemborosan) (Jamil Ahmad, Seratus Muslim Terkemuka, 1992, hal. 49).

Dua pemimpin negara yang ditegur karena keuangan negara. Betapa penting alokasi keuangan negara itu harus diperhatikan. Karena sekali salah dalam mengalokasikan keuangan negara tersebut fatal akibatnya.

Dia berorientasi pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Karena *dengan rakyat berdaya maka akan mendorong daya beli, daya beli kuat maka industri akan kuat, jika industri kuat maka akan luas penyerapan tenaga kerja / mengurangi pengangguran.*

Alokasi dalam hal ini adalah APBN, jangan sampai menjadi ajang rebutan “*bubur panas.*” Artinya dengan berbagai kepentingan politik dan ekonomi para elit pengatur, bubur panas tersebut “*rak kepangan malah utah*” (tidak dapat dinikmati oleh yang bertikai malahan menjadi sumber petaka).

Pemahaman tentang Kekayaan

Ada jenis kekayaan yang menjadi hak milik semua orang yaitu api, air dan padang rumput (Hadist dari Imam Al Khadzim). Padahal meskipun secara potensi setiap orang dapat memilikinya tetapi hanya para pemilik alat produksi yang dapat mengambil semua atau lebih banyak dibanding bagi orang yang tidak memiliki alat produksi. Oleh karena itu sudah sepatutnyalah bagi yang memiliki alat produksi yang banyak mengeksploitasi api, air dan padang rumput mengembalikan sebagian penghasilan

kepada orang yang tidak memiliki alat produksi (orang miskin). Maka di Hadits lain dikatakan bahwa “sebagian harta orang kaya adalah hak bagi orang miskin”.

Menurut **Behesti** bahwa merusak makan milik sendiri adalah dosa satu dan jika merusak makan orang lain adalah dosa dua. Artinya bahwa kita menghilangkan kesempatan / makanan tersebut untuk dapat dinikmati orang lain (Behesti, Kepemilikan dalam Islam, 1992, hal.9)

Suatu kewajiban untuk mengembalikan hak orang miskin (zakat, infaq, sodaqoh) yang semestinya secara potensi memiliki sumber daya ekonomi, karena tidak memiliki alat produksi sehingga kepemilikannya termanfaatkan oleh para pemilik alat produksi. Maka pajak yang besar bagi pemilik alat produksi adalah harus dikembalikan dalam bentuk *subsidi* yang besar pula kepada yang tidak memiliki alat produksi. Ketika pajak tidak kembali menjadi subsidi, melainkan untuk membangun rumah pejabat, tunjangan pejabat, dana sidang, dana transportasi, atau “istana atas angin” yang tidak ada konsekuensi pemberdayaan masyarakat berarti bertentangan dengan konsepsi ekonomi Abudzar (Alqur’an dan Hadist) yang akibatnya krisis tak kunjung usai.

Adalah **Umar bin Abdul Azis** (Jamil Ahmad, Seratus Muslim Terkemuka, Pustaka Firdaus, 1992) seorang ulama’ dan sekaligus Khalifah. Dia dengan kejujuran dan kebersihannya dalam memimpin negara. Kisah khalifah yang selalu dibacakan ceritanya kepada kita dan anak kita di sekolah-sekolah.

Ketika Khalifah Umar bin Abdul Azis duduk santai disebuah ruang kerja mempelajari setumpuk dokumen negara. Tiba-tiba istrinya datang menghampirinya untuk bicara masalah keluarga.

“Yang Mulia, Maukah anda memberikan waktu untukku sejenak? Istrinya mohon ijin.

“Tentu saja, masalah negara atau keluarga” tanya Khalifah sambil berpaling dari kertas-kertas diatas mejanya.

“Masalah keluarga yang Mulia” jawab istrinya.

“Matikan lampu negara dan hidupkan lampu keluarga”

“Kenapa?”

“Saya tidak mau memakai minyak negara untuk pembicaraan pribadi” jawab Khalifah tegas.

Sebuah teladan spritual ekonomi negara yang cocok untuk ditiru, mengingat asap menggumpal hitam diatas atap istana negara. Meskipun masih misteri sumber apinya. Tetapi pepatah mengatakan *tidak ada asap tidak ada api*.

Spiritualisme ekonomi pantas untuk seorang pemimpin negara yang menyandang tokoh spiritual yaitu kiyai. Yang tidak perlu dialektik, bersifat lidah dan penuh kontroversi.

Emha Ainun Najib (Slilit Sang Kiyai, Grafiti, 1992) pernah memberikan pelajaran tentang *jeleknya mencuri*. Pelajaran singkat tentang nasib kiyai yang terancam kesempatannya masuk surga. Kucuplikkan keluhan sang kiyai lewat mimpi santrinya. “Baik-baik, nak. Dosa-dosaku umumnya diampuni. Amalku diterima. Cuma ada satu hal yang membuatku masygul. Kalian ingat waktu aku memimpin kenduri di rumah Pak Kusen? Sehabis makan bareng, hadirin berebut menyalamiku, hingga tak sempat aku mengurus *slilit* di gigiku. Ketika pulang di tengah jalan barulah bisa kulakukan sesuatu. Karena lupa tidak bawa tusuk *slilit* maka aku mengambil potongan kayu kecil dari pagar orang. Kini, alangkah sedihnya aku tak sempat minta maaf pada yang empunya perihal tindakan mencuri itu. Apakah Allah kan mengampuniku?”

Para santripun berduka. Kemudian membayangkan, alangkah lebih malangnya nasib sang kiyai bila slilit digiginya itu. Serta tusuk slilit yang dicuri dari pagar orang lain itu sebesar glondongan kayu raksasa kalimantan, lebih-lebih jika menyamai Hotel Asoka atau Candi Borobudur, atau paling tidak satelit palapa. Untuk setting masa kini adalah dana mobilitas rumah dinas, kunjungan ke luar negeri adalah dapat menjadi tusk slilit.

Emha secara radikal ingin mengajari bagaimana spiritual ekonomi dijalankan yaitu sekecil apapun pencurian adalah mengancam kita dalam proses penghitungan hisab di alam kubur. Dan di dunia adalah menjadi sebab bagaimana sistem ekonomi terganggu.

Asghar Ali Engineer (Islam dan Teologi Pembebasan, Pustaka Pelajar, 1999), sangat keras mendefinisikan orang yang menjalankan perekonomian tidak benar yaitu *status keimanannya adalah kafir*. Disitirkan sebuah perkataan Umar Bin Khattab “ Suatu pemimpin jika ada seekor anjing mati ditepi sungai karena kehausan, maka dirinya akan dimintai pertanggungjawaban kelak”

Menegakkan sistem ekonomi Islam berarti harus menegakkan etika moral, kejujuran dan kebersihan hati dari segala bentuk hawa nafsu ekonomi.

Gambling Economics System dalam Sistem Ekonomi Konvensional

Dalam sistem ekonomi makro kita lihat secara terselubung ada bentuk perjudian sehingga penulis sebut sebagai *Gambling Economics System* (GES). Diantara yang bisa kita sebut GES adalah proses terjadinya pasar modal lewat bursa efek maupun valuta asing dan mekanisme perbankan yang ada.

Dalam bursa efek, kalau boleh dibilang seperti tebak/perjudian dadu. Kita lihat para spekulan ketika membeli saham, mereka tidak peduli perusahaan itu untung atau rugi, bermanfaat atau tidak. Mereka membeli atas dasar motivasi mendapatkan *Capital Gain*, bukannya menanam modal untuk ikut berpartisipasi dalam produksi barang atau jasa. Ini sangat bertentangan dengan paham ekonomi *physiokrat* bahwa dianggap melakukan kegiatan ekonomi jika menghasilkan barang atau jasa secara riil baik langsung maupun tidak langsung.

Di bursa efek dalam satu detik saja bisa mendapatkan kerugian maupun keuntungan milyaran rupiah dengan melakukan pembelian atau penjualan berbagai saham. Uang berputar secara utuh dalam lingkaran bursa efek dari spekulan satu ke spekulan lain dalam jual beli saham, sebagaimana orang main remi satu meja kemudian uang berputar-putar dari penjudi satu ke penjudi lain sesuai kemungkinan kemenangan yang bergantian sampai perjudian selesai. Dari sini juga terjadi *distorsi* pengertian *investor* yang menanam modal sesungguhnya padahal mereka hanyalah spekulator yang sedang melakukan taruhan uang.

Hampir sama dengan bursa efek. Para spekulan valuta asing tidak peduli dengan proses perdagangan antar negara. Mereka menjual dan membeli valuta asing hanya berdasarkan harga yang terjadi, tidak mementingkan uang tersebut mendorong ekspor atau impor. Mereka secara bebas satu menit, jam, hari, minggu, atau bulan untuk menjual atau membeli valuta asing. Padahal valuta asing adalah konversi harga barang dari negara satu dengan negara lain kemudian memunculkan nilai mata uang antar negara. Tetapi ketika mata uang masing-masing negara mempunyai nilai yang berselisih dijadikan alat spekulasi.

Uang berputar secara utuh dalam lingkaran *money changer* dari spekulan satu ke spekulan lain dalam jual beli valuta asing, sebagaimana orang main remi satu meja kemudian uang berputar-putar dari penjudi satu ke penjudi lain sesuai kemungkinan kemenangan yang bergantian sampai perjudian selesai.

Distorsi

Baik bursa efek maupun valuta asing sebenarnya adalah bertujuan untuk membantu meningkatkan kapasitas produksi. Perusahaan bertujuan untuk mendapatkan modal besar melalui *go public* sehingga mendapatkan modal dari masyarakat. Tetapi yang terjadi di pasar sekunder (bursa efek) tidak demikian, meskipun ada yang membeli saham untuk atas nama sehingga menjadi anggota pemegang saham. Tetapi bursa efek dijadikan para spekulasi sebagaimana meja judi, dimana uang berputar-putar dari saham satu ke saham yang lain tidak peduli proses produksi yang terjadi. Padahal mekanisme ekonomi yang sebenarnya adalah bagaimana melakukan proses produksi untuk menciptakan nilai tambah.

Tidak pernah kita dengarkan berita bursa efek tentang nilai saham dan valuta asing, signifikasi dengan nilai atau jumlah produksi barang atau jasa, sehingga mempengaruhi penawaran yang meningkatkan pelayanan masyarakat. Tetapi yang terdengar adalah naik turunnya harga yang kemudian *diasosiasikan* dengan pernyataan politik presiden, gejala masyarakat, demonstrasi dan bencana alam. Justru faktor *fundamental* (pengaruhnya terhadap produksi) atau pengaruh ekonomi menjadi diabaikan karena para spekulasi motivasinya adalah keuntungan jangka pendek yaitu *capital gain* atau *valas gain*.

Implikasi

Putaran dan penciptaan uang akan jauh lebih cepat dari proses produksi sehingga harga akan selalu naik-turun atau bergejolak akibat dari proses spekulasi uang. Seperti yang dikatakan **The Fei Ming**, 2001 dalam buku *Daya Trading Valuta Asing* bahwa “peramalan harga didasarkan pada harga valuta dari waktu ke waktu berupa *trend* naik atau turun dan jumlah transaksi yang terjadi di pasar valuta asing”. Bahkan dalam penelitiannya, terjadi paradoks antara pengaruh fundamental (faktor ekonomi) dengan kenyataan yang terjadi. Yaitu secara fundamental semestinya USD (Dolar Amerika Serikat) naik atas JPY (Yen Jepang), tetapi yang terjadi sebaliknya.

Instrumen kebijakan moneter yang berlaku yaitu tentang kebijakan pengetatan uang (*Tight Money Policy (TMP)*) dan kebijakan pelonggaran uang (*Easy Money Policy (EMP)*) lewat tingkat suku bunga mendorong terjadinya GES. Dua kebijakan moneter tersebut dilakukan atas dasar menaik-turunkan tingkat suku bunga. Hal ini akan menjadi

alat untuk memanfaatkan uang yang dimiliki spekulan untuk spekulasi baik di bank, Valas maupun Bursa Efek.

Dua kebijakan yang tak pernah sampai tujuan untuk mempengaruhi produksi karena justru ditangkap oleh para spekulan uang. Sehingga yang terjadi adalah pergantian antara *inflasi* jika diterapkan EMP dan *pengangguran* jika diterapkan TMP.

“Perjudian” di sektor kebijakan moneter seakan diterapkan BI karena ketika BI menerapkan bunga sampai 50 % atau lebih di tahun 1988 untuk mengambil kebijakan TMP supaya uang beredar berkurang tapi itu tidaklah mungkin karena uang beredar adalah uang ASPAL (Asli Tapi Palsu) yang berhasil diketahui sindikatnya sampai dengan tahun 2000 sekitar sebesar Rp. 29.543.170.000.000,- (**Data Bank Indonesia, dalam Elst Reba**), belum ditambah yang tidak dapat terpantau. TMP bukan menyedot uang yang beredar keluaran BI tetapi harus untuk menyedot uang palsu.

Sistem yang berlaku menjadikan para spekulan merespon lebih cepat dibandingkan oleh para investor (pelaku produksi). Padahal spekulan adalah berbeda sama sekali dengan investor berpengaruh langsung pada produksi.

Sedangkan sistem Valas mengakibatkan monopoli **George Soros** tingkat internasional. Siapa yang mampu mengendalikan Rupiah meskipun dari Amerika atau dari Swiss lewat *money changer*. Seperti melalui *Hedging fund* yang dilakukan oleh lewat *quantum fund*, ia kapan saja dapat melepas dan menarik uangnya lewat money changer akan mempengaruhi jumlah uang yang beredar (JUB) suatu negara sehingga menyebabkan fluktuasi nilai uang tersebut walaupun tidak ada pengaruhnya terhadap jumlah produk negara yang bersangkutan.

GES adalah sebuah mekanisme interaksi sektor moneter yang sama sekali tidak menyentuh sektor riil. Jadi ketika kebijakan moneter tidak signifikan pengaruhnya terhadap sektor riil maka sistem ekonomi yang terjadi adalah GES.

Mengapa harus bermuara pada sektor riil? Karena ekonomi bukanlah ilusi, impian atau fatamorgana. Ketika kita ingin memenuhi pangan maka riilnya adalah tersedianya pangan dengan jumlah yang cukup dan harga yang rendah. Hal ini sesuai dengan Irving Fisher Theory atau yang disebut teori kuantitas uang bahwa jika jumlah uang yang beredar bertambah tidak diikuti pertambahan jumlah produksi maka akan mendorong meningkatnya harga-harga.

Sistem Bunga

Sistem bunga dalam permodalan memang bisa dikonversi dengan sistem bagi hasil dalam kerja sama dibidang modal, tapi karena masing-masing memiliki privasi dan tak bisa saling mengawasi muncul sistem bunga. Sistem bunga adalah bentuk *distorsi* (perusakan) atau *simpliasi* (penyederhanaan) dari sistem bagi hasil.

Menurut **Boediono**, 1985 dalam buku Ekonomi Makro, bahwa keputusan memegang uang bukan atas dasar manfaat untuk menambah barang atau jasa melainkan atas dasar ramalan-ramalan tingkat suku bunga, harga saham di bursa efek dan harga valas yang akan terjadi. Inilah sumber spekulasi yang penulis sebut GES.

Oleh karena itu apakah para spekulan yang memanfaatkan sistem bunga untuk dijadikan alat spekulasi uang tersebut menyebabkan munculnya GES atau sistem yang terjadi memang GES ?

Menurut **HMT Oppusunggu**, 1999 dalam buku Matinya Ekonomi Moneter, bahwa BI telah menjadi batu sandungan terbesar dalam penyelesaian kemelut ekonomi terutama moneter. BI telah menjadi sebuah krisis tersendiri karena jauh menyimpang dari kaidah, teori dan analisis moneter. Bagi penulis mempertanyakan bahwa BI *menyimpan dari teori* atau *memang teori yang digunakan memang salah* karena GES adanya. GES di Indonesia menciptakan masalah besar yaitu penyelewengan BLBI. Bagaimana tidak ? Uang BI dijadikan taruhan dalam lingkungan spekulasi bank-bank yang sedang kolap. GES terjadi karena banyak terlihat pengaturan ekonomi di Indonesia atas dasar “*tebakan*” bukan “*kepastian*”. Maka betul kata **HMT Oppusunggu** bahwa BI hanya pandai “*mendongeng*”. Kalau penulis boleh berkata BI menjadi “*bandar judi*” yang kebetulan sedang kalah.

Sistem Moneter dalam Islam

Dalam sudut pandang ekonomi Islam sangat menentang spekulasi (berdekatan dengan perjudian), tetapi semua harus *riil*, *terukur* dan *tidak riba* (resiko kerugian satu pihak atau keduanya) di kemudian hari. Dalam Islam tidak ada konsepsi uang sebagai alat spekulasi yang ada uang sebagai alat tukar. Kemudian tidak ada uang menjadi komoditas yang tak sebanding dengan daya tukarnya. Hal demikian karena nilai uang berfluktuatif meskipun bukan disebabkan karena *faktor fundamental ekonomi* melainkan hanya sekedar pernyataan kontroversial para *decision maker*. Seperti pernyataann **Kwik**

Kian Gie untuk segera memutuskan hubungan dengan IMF. Oleh karena itu tidak ada jeleknya jika kita mencoba *back to dinar* yaitu mata uang dengan standar nilai emas.

Pajak dan Subsidi

Ada persoalan ekonomi yang tidak dapat diselesaikan lewat mekanisme pasar. Setiap aktifitas ekonomi memiliki dampak eksternalitas baik positif maupun negatif. Masyarakat sebagian menciptakan produk yang menguntungkan kelompok masyarakat yang lain tetapi ada juga sebagian merugikan kelompok masyarakat yang lain yang disebut *eksternalitas negatif*.

Menurut **Kaldor** bahwa suatu tindakan dikatakan bermanfaat (baik), apabila golongan yang memperoleh manfaat dari tindakan tersebut memberikan kompensasi bagi golongan yang mengalami kerugian sehingga posisi golongan yang rugi sama seperti halnya sebelum adanya tindakan yang bersangkutan. Dan menurut analisis **Coase**, penyelesaian *effisien* terhadap *eksternalitas negatif* tergantung pada pihak mana yang dapat menghindari masalah dengan biaya yang lebih rendah.

Siapakah yang mengatur kompensasi kerugian akibat dari *social cost* atau *eksternalitas negatif*? Kompensasi tidak semata-mata dapat diselesaikan lewat mekanisme pasar. Oleh karena itu perlu otoritas pemerintah dalam pengaturan mekanisme kompensasi kerugian masyarakat akibat dari *social cost* yang diterima.

Pemerintah memiliki dua instrumen fiskal yaitu *pajak* dan *subsidi*. Pajak ditarik dari kelompok masyarakat (wajib pajak) karena produksi yang menghasilkan keuntungan-keuntungan yang diterima oleh wajib pajak karena memanfaatkan sumber-sumber ekonomi. Dimana sumber-sumber ekonomi tersebut tidak semua barang privat (yang dimiliki secara pribadi) tetapi banyak barang bebas, barang publik dan barang yang menjadi monopoli negara. Berarti wajib pajak mengambil/memanfaatkan hak milik sebagian masyarakat yang tidak melakukan produksi.

Sementara itu subsidi diberikan kepada masyarakat yang tidak banyak menggunakan sumber-sumber ekonomi karena tidak berproduksi. Oleh karena itu subsidi sebagai keseimbangan dari pajak.

Persoalannya adalah bagaimana pengukuran kompensasi dari pajak diberikan dalam bentuk subsidi? Bagaimana penentuan sasaran yang menjadi wajib dan penerima subsidi? Kemudian dalam bentuk apa subsidi harus diberikan? Suatu pertanyaan mendasar yang harus diselesaikan oleh pemerintah.

Oleh karena itu perlu perundang-undangan yang mengaturnya. Undang-undang tersebut harus merespon representasi dari masyarakat wajib pajak dan penerima subsidi. Dalam hal ini lewat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah secara bersama harus menyelesaikan persoalan pajak dan subsidi sebagai instrumen kompensasi.

Dalam hal ini pemerintah memiliki peran sebagai regulator, dinamisator dan protektor. Ketika pemerintah dan DPR mampu membuat perundang-undangan sebagai peran regulator. Maka peran regulator harus mempunyai peran lanjutan yaitu protektor (melindungi produsen atau konsumen).

Bagaimana pajak supaya tidak menjadu penghambat dan mampu menjadi alat perlindungan bagi industri? Dari sinilah terjadi paradoks-paradoks dari kebijakan pemerintah. Oleh karena itu perlu ketepatan pengukuran dan sasaran wajib pajak dan penerima subsidi.

Paradigma Alternatif

Karena tidak semua warga negara menikmati barang publik dan barang monopoli negara, maka kebijakan subsidi untuk barang publik dan barang monopoli negara dihapuskan. Pengguna harus dibebani pajak karena pengguna menjadi pihak yang lebih banyak memanfaatkan sumber-sumber ekonomi baik dari barang bebas, publik maupun monopoli negara.

Pihak yang tidak mendapatkan bagian dari barang publik dan barang monopoli tidak menikmati / menerima subsidi. Mereka adalah pihak yang tidak dapat memanfaatkan sumber-sumber ekonomi karena tidak memiliki alat produksi.

Maka paradigma subsidi barang publik dan monopoli sangat merugikan bagi masyarakat yang tidak menggunakan . Ada dua kerugian baginya yaitu *pertama* tidak kebagian nilai manfaat dan yang *kedua* tidak menikmati nilai subsidi. Padahal sumber-sumber ekonomi yang menjadi faktor produksi barang publik dan monopoli negara juga menjadi milik mereka yang tidak memanfaatkan tersebut.

Zakat sebagai Sistem Fiskal dalam Islam

Pemerintah meskipun sudah memiliki instrumen pajak dan subsidi masih kesulitan melakukan kompensasi atas terjadinya eksternalitas dan ketidak merataan pengguna barang publik dan barang monopoli negara. Dari sini *Zakat* dapat menjadi instrumen kompensasi. Karena zakat berdasarkan nisab kekayaan tertentu diwajibkan

membayar zakat. Oleh karena itu sangat proporsional antara jumlah kekayaan dan jumlah zakat yang harus dibayarkan.

Secara logika ekonomi, *zakat* harus dibayarkan karena setiap perolehan kekayaan berarti sejumlah sumber-sumber ekonomi baik dari barang bebas, barang publik atau barang monopoli negara yang dimanfaatkannya. Dan di dalam pemanfaatannya tersebut terkandung hak bagi orang yang tidak menggunakan karena tidak memiliki alat produksi. Artinya semakin besar pemilikan alat produksi, semakin besar perolehan kekayaan, dan semakin besar pemanfaatan sumber-sumber ekonomi barang bebas, barang publik dan barang monopoli negara. Oleh karena itu semakin besar pula keharusan mereka membayar zakat.

Tetapi lembaga manakah yang dapat memaksakan kepada wajib zakat secara legal? Dan sudah siapkah lembaga zakat yang selama ini ada? Lalu bagaimana pengaturan tumpang tindihnya zakat dan pajak?

Dari sini perlu undang-undang zakat sehingga penarikan pajak mempunyai kekuatan untuk “memaksanya”. Selama ini zakat adalah kesadaran dari sebagian masyarakat yang beriman akan adanya pahala dan dosa yang *abstrak*. Padahal dalam penggunaan sumber-sumber ekonomi adalah persoalan *riil* bukan sekedar persoalan pahala dan dosa, melainkan bagaimana memberi kompensasi kepada kelompok masyarakat lain yang tidak atau sedikit menggunakan sumber-sumber ekonomi. Dari sini benar kata kitab suci bahwa *sebagian harta orang kaya ada hak orang miskin*.

Setiap proses produksi selalu diikuti terjadinya eksternalitas. Eksternalitas negatif selalu menimpa kepada orang yang tidak memiliki alat produksi. Dalam *Fiqh Syafi'i*, tidak ada larangan berproduksi berapapun banyaknya dan pemilikan pribadi atas alat produksi kecuali mereka diwajibkan membayar zakat. Oleh karena itu zakat adalah kompensasinya.

Hanya dalam Islam terdapat petunjuk secara detil mengenai zakat di masing-masing kekayaan dan cara perolehannya. Dari sini penarikan zakat harus dilindungi undang-undang sehingga dapat menarik secara paksa, yang tidak hanya menunggu kesadaran wajib zakat.

Untuk mengaktualisasikan peran pemerintah dalam pengaturan fiskal yang didalamnya ada uang zakat perlu pertimbangan sebagai berikut:

1. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat harus tepat menentukan mana barang-barang yang menguasai hajat hidup orang banyak yang harus dimonopoli negara dalam pengelolaannya.
2. Sasaran pajak dan subsidi harus tepat, karena sebagai kompensasi dari yang diuntungkan maupun yang dirugikan secara tidak langsung, karena tidak sama dalam menggunakan barang bebas, barang publik dan barang monopoli negara.
3. Zakat sebagai alternatif kompensasi, sehingga perlu di undang-undangkan dan memiliki kemampuan paksa kepada wajib zakat untuk membayarnya.
4. Lembaga zakat dapat menjadi instrumen negara dan dimasukkan dalam unsur APBN atau APBD.
5. Perlu sinkronisasi antara pajak dan zakat karena dimungkinkan terdapat *double account*.

Pengembalian ke Konsepsi Ekonomi Islam

Untuk mengembalikan kepada konsepsi dan perilaku ekonomi Islam sebagai instrumental Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, maka ada beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Membangun mental seperti yang dicontohkan oleh Abudzar yaitu tidak boros tetapi juga tidak menghambat peredaran sumber-sumber ekonomi. Sikap kesederhanaan dan pemerataan mengefektifkan fungsi kerakyatan dalam proses mekanisme perekonomian yaitu dengan cara meningkatkan daya beli konsumsi masyarakat. Dengan demikian ekonomi kerakyatan akan bangkit dari interaksi ekonomi yang tidak terhambat karena idle capital yaitu banyak sumber-sumber ekonomi yang menganggur / tersimpan.
2. Membangun mental penguasa atau pemegang kebijakan ekonomi seperti yang dicontohkan oleh Umar bin Abdul Aziz yaitu sikap jujur, amanah dengan konsepsi pemisahan kepentingan negara dan keluarga secara ketat.
3. Sistemisasi secara utuh bagaimana mekanisme moneter sebagai aliran darah perekonomian tidak terkontaminasi adanya Gambling Economic System.
4. Politik alokasi dalam anggaran yang menyertakan arus zakat sebagai *instrumen negara dalam fungsi perumbuhan pemerataan dan perlindungan terhadap pembangunan ekonomi*.

5. Pengefektifan Zakat, Infak dan Sadaqoh (ZIS) bukan lagi kesadaran tanpa pengaturan tetapi harus ada Lembaga atau Badan yang mengelola sehingga memiliki “daya paksa” melalui undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an dan Terjemahan

Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembelaan*, 1999, Pustaka Pelajar, Jakarta

Bahesti, *Kepemilikan dalam Islam*, 1992

Boediono, *Ekonomi Makro*, 1995, BPFE Yogyakarta

Boediono, *Data Bank Indonesia*, 2000, Elst Reba

Emha Ainun Najib, *Slilit Sang Kyai*, 1992, Grafitti, Jakarta

HMT Oppusunggu, *Matinya Ekonomi Moneter*, 1999, Grasindo, Jakarta

Jamil Ahmad, *Seratus Muslim Terkemuka*, 1992, Pustaka Firdaus, Jakarta

Kaldor, *Ekonomi Publik*, 1993, BPFE, Yogyakarta

The Fei Ming, *Day Training Valuta Asing*, 2001, Gramedia, Jakarta

William A.Mc.Eachen, *Ekonomi Mikro*, 2001, Salemba Empat, Jakarta